

PENGARUH UPAH MINIMUM DAN JUMLAH UNIT USAHA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2010-2024

Muchtar¹, Supriyanto², Nur Aini Aulia Julianti³

Universitas Darul 'Ulum Jombang

E-mail: muchtaralam99@gmail.com¹, supriyantoaji67@gmail.com², auliajulianti094@gmail.com³

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh upah minimum dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010–2024. Sektor industri pengolahan berperan sebagai salah satu pilar utama perekonomian Jawa Timur yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar guna menekan tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah sampel sebanyak 29 kabupaten dan kota. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, variabel upah minimum dan jumlah unit usaha berpengaruh positif serta signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri Jawa Timur. Sementara itu, hasil uji simultan juga memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan terkait upah minimum serta pengembangan unit usaha perlu terus diperhatikan dan dijaga agar tidak menimbulkan hambatan dalam proses penyerapan tenaga kerja. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah variabel yang digunakan serta rentang waktu observasi yang terbatas.

Kata Kunci: Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja, Industri, Jawa Timur.

Abstract – This study aims to examine the effect of minimum wages and the number of business units on labor absorption in the industrial sector in East Java Province during the period 2010–2024. The manufacturing industry sector plays a role as one of the main pillars of the East Java economy, which is expected to absorb a large number of workers to reduce the unemployment rate in the region. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of East Java Province, with a sample of 29 regencies and cities. The analysis method used is a quantitative approach, with the assistance of Statistical Product and Service Solutions (SPSS) software version 2025. The results of the analysis indicate that partially, the minimum wage and the number of business units have a positive and significant effect on labor absorption in the industrial sector of East Java. Meanwhile, the results of the simultaneous test also show that both variables together have a positive and significant effect on increasing labor absorption. This study indicates that increasing the minimum wage and the growth in the number of business units have an important contribution in expanding employment opportunities in the industrial sector. Therefore, policies related to minimum wages and the development of business units need to be continuously monitored and maintained to avoid creating obstacles in the labor absorption process. The limitations of this study lie in the number of variables used and the limited observation period.

Keywords: Minimum Wage, Number Of Business Units, Labor Absorption, Industry, East Java.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakatnya. Salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan adalah penyerapan tenaga kerja yang optimal, karena tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja mencerminkan adanya aktivitas ekonomi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka pengangguran (Fikri & Alfaridzi, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja menjadi fokus utama dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi adalah sektor industri, yang menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur. Sektor ini tidak hanya mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja (Sukarniati et al., 2021). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sektor industri pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 30% terhadap PDRB Jawa Timur, menjadikannya sebagai sektor unggulan dan strategis bagi perekonomian daerah.

Namun demikian, meskipun peran sektor industri terus meningkat, penyerapan tenaga kerja belum menunjukkan peningkatan yang sepadan dengan pertumbuhan output industrinya. Kondisi ini menunjukkan adanya

ketidakseimbangan antara pertumbuhan sektor industri dan kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja baru, yang dikenal dengan istilah *jobless growth* (Miradj & Shofwan, 2021). Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pengangguran di daerah.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja adalah kebijakan upah minimum. Kebijakan ini pada dasarnya dirancang untuk melindungi pekerja dan menjamin kesejahteraan mereka. Namun, di sisi lain, besaran upah minimum juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja baru (Azzahra & Mukhtar, 2023). Apabila tingkat upah lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja, maka perusahaan cenderung menekan perekrutan untuk mengurangi beban biaya produksi.

Kepulauan di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi adalah Pulau Jawa, di mana Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Provinsi ini memiliki populasi sekitar 41,14 juta jiwa, atau sekitar 14,75 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18,51 juta jiwa tergolong sebagai angkatan kerja (BPS, 2025). Angkatan kerja yang cukup besar ini tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Selain itu, jumlah penduduk di provinsi ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur 2010-2024 (jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk
2010	37.476.800
2011	37.565.706
2012	38.107.095
2013	38.262.424
2014	38.565.706
2015	39.107.095
2016	39.075.152
2017	39.292.972
2018	39.501.531
2019	39.698.631
2020	40.665.696
2021	40.878.789
2022	41.149.974
2023	41.527.962
2024	41.814.421

Sumber: Data BPS Jawa Timur berbagai edisi, (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2010 sebesar 37.476.800 jiwa, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 41.920.000 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi ini tentunya akan menimbulkan masalah. Ini disebabkan karena jumlah penduduk yang tinggi diiringi dengan jumlah tenaga kerja yang tinggi pula. Masalah yang timbul yakni akan meningkatkan jumlah pengangguran karena masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran yang tinggi diyakini sebagai penyebab utama kemiskinan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu linear. Penelitian oleh Syakur et al., (2024) menemukan bahwa upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan jumlah perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan lapangan kerja (Aprilia Sasi Lestari et al., 2024). Hal ini menandakan bahwa faktor struktural, seperti banyaknya unit usaha, mungkin lebih menentukan dibanding besaran upah itu sendiri.

Selanjutnya, jumlah unit usaha juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak unit usaha yang beroperasi di suatu wilayah, maka semakin besar pula peluang kerja yang tersedia karena setiap unit usaha membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan produksinya (Billa Ananda et al., 2022). Dalam konteks Jawa Timur, peningkatan jumlah industri kecil, menengah, dan besar terbukti berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah industri seperti Gresik, Pasuruan, dan Sidoarjo. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah unit usaha industri di Jawa Timur pada periode 2010-2024.

Tabel 2
Jumlah Unit Usaha Pada Sektor Industri Sedang dan Besar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024

Tahun	Unit Usaha
2010	36.226
2011	42.514
2012	55.851
2013	61.674
2014	107.478
2015	252.731
2016	437.542
2017	596.062
2018	814.848
2019	807.478
2020	811.273
2021	813.140
2022	818.848
2023	821.804
2024	823.127

Sumber: BPS Jawa Timur diolah (2025).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah unit usaha di sektor industri sedang dan besar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, terdapat 36.226 unit usaha, dan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan menjadi 814.848 unit pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan akibat dari pandemi menjadi 807.478 unit,

kemudian unit usaha kembali meningkat setelah normalisasi hingga Tahun 2024 menjadi 823.127 unit. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti aksi lokasi provinsi Jawa Timur yang strategis sehingga memancing investor untuk berinvestasi pada usaha-usaha di Jawa Timur, pertumbuhan penduduk dan permintaan akan barang atau jasa yang tinggi, serta kestabilan politik. Jika dilihat dari banyaknya jumlah unit usaha pada industri sedang dan besar yang ada di Provinsi Jawa Timur maka akan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga nantinya dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah dan mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian (Waloni et al., 2025) juga memperkuat temuan tersebut, bahwa jumlah unit usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan upah minimum justru berpengaruh negatif signifikan. Artinya, peningkatan jumlah perusahaan baru terbukti lebih efektif dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan kebijakan peningkatan upah minimum.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur (2024), jumlah industri pengolahan di provinsi ini mencapai lebih dari 45 ribu unit usaha, dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur pada tahun 2024 masih berada di kisaran 3,7%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Adapun Tingkat pengangguran dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di Indonesia periode Agustus Tahun 2010-2024 (%)

No.	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	DKI Jakarta	11,05	11,69	9,67	8,63	8,47	7,23	6,12	7,14	6,65	6,54	10,95	8,50	7,18	6,53	6,03
2.	Jawa Barat	10,33	9,96	9,08	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44	6,91
3.	Jawa Tengah	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,63	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
4.	DIY	5,69	4,39	3,90	3,24	3,33	4,07	2,72	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69	3,24
5.	Jawa Timur	4,25	5,38	4,11	4,30	4,19	4,47	4,21	4,00	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88	3,74
6.	Banten	13,68	13,74	9,94	9,54	9,07	9,55	8,92	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52	7,02
	Indonesia	7,14	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82

Sumber: Data BPS Jawa Timur berbagai edisi, (2025)

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah dibandingkan dengan 4 Provinsi lainnya, Jawa Timur sendiri menempati peringkat kelima di Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pengangguran di provinsi Jawa Timur masih cukup besar, yang pada akhirnya menambah beban bagi angkatan kerja yang telah memperoleh pekerjaan.

Selain itu, kondisi ekonomi global dan nasional pasca pandemi COVID-19 juga turut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Banyak perusahaan yang mengurangi skala produksi, menunda ekspansi, bahkan beralih ke sistem otomatisasi yang justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja (Agista et al., 2021). Meskipun demikian, beberapa sektor padat karya seperti tekstil serta makanan dan minuman tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur.

Di sisi lain, kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur menunjukkan adanya variasi antarwilayah. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Kota Surabaya memiliki UMK sebesar Rp.4.725.479, sedangkan Kabupaten Kediri hanya Rp.2.340.668

(Disnakertrans Jatim, 2024). Perbedaan ini mencerminkan disparitas ekonomi antarwilayah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi distribusi tenaga kerja antar daerah.

Tabel 4
Rata-rata Kebutuhan Hidup Layak(KHL) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024 (Rupiah)

Tahun	KHL	UMK
2010	856.888	1.000.005
2011	731.635	1.079.887
2012	731.635	1.133.000
2013	825.000	1.165.000
2014	825.000	1.165.000
2015	825.000	1.165.000
2016	825.000	1.165.000
2017	731.635	1.388.000
2018	879.250	1.508.894
2019	984.640	1.630.059
2020	1.132.250	1.768.777
2021	1.327.048	1.868.777
2022	1.664.599	2.040.244
2023	1.647.962	2.165.244
2024	1.875.450	2.370.488

Sumber: BPS Jawa Timur diolah (2025).

Berdasarkan Tabel 4 pada tahun 2010 dan 2024 Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur (diolah, 2025), perkembangan rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi dari tahun ke tahun.

Pada awal periode, yaitu tahun 2010, KHL tercatat sebesar Rp856.888 sementara UMK berada pada angka Rp1.000.005. Nilai KHL sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 hingga 2012 sebesar Rp731.635, sedangkan UMK justru meningkat dari Rp1.079.887 menjadi Rp1.133.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode awal, penetapan upah minimum belum sepenuhnya mengikuti dinamika kebutuhan hidup layak masyarakat pekerja.

Memasuki tahun 2013 hingga 2016, baik KHL maupun UMK relatif stagnan di kisaran Rp825.000 untuk KHL dan Rp1.165.000 untuk UMK. Namun, mulai tahun 2017, terjadi peningkatan cukup tajam, di mana UMK naik menjadi Rp1.388.000, sementara KHL masih berada di angka Rp731.635, yang menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan upah untuk meningkatkan daya beli pekerja.

Tren peningkatan berlanjut pada periode 2018–2024, di mana setiap tahun terjadi kenaikan konsisten pada kedua variabel tersebut. KHL naik dari Rp879.250 pada tahun 2018 menjadi Rp1.875.450 pada tahun 2024, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu enam tahun. Sementara itu, UMK tumbuh dari Rp1.508.894 menjadi Rp2.370.488 menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan tingkat upah dengan kebutuhan hidup dan inflasi regional.

Peningkatan yang relatif sejalan antara KHL dan UMK selama periode ini mengindikasikan adanya penyesuaian struktural dalam kebijakan pengupahan di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan upah minimum yang mengikuti pertumbuhan KHL diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menjaga daya saing tenaga kerja di sektor industri.

Dalam konteks penelitian ini, variabel upah minimum menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Kenaikan UMK yang cukup pesat dapat menimbulkan dua efek:

1. Efek positif, berupa peningkatan motivasi dan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Efek negatif, berupa potensi penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja jika perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Selain itu, jumlah unit usaha industri yang beroperasi di Jawa Timur juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Ketika jumlah unit usaha meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja juga cenderung naik. Namun, dinamika ini sangat bergantung pada kebijakan upah minimum dan kondisi ekonomi makro.

Secara keseluruhan, periode 2010–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMK dan KHL di Jawa Timur berjalan cukup beriringan, dengan arah kebijakan yang cenderung menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Analisis selanjutnya dalam penelitian ini akan menguji secara empiris sejauh mana perubahan upah minimum dan jumlah unit usaha memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama periode tersebut.

Penelitian oleh (Widodo & Woyanti, 2023) di Kabupaten Gresik juga menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan jumlah unit usaha memiliki pengaruh positif signifikan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa peningkatan jumlah industri baru lebih berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran dibanding kebijakan upah minimum semata.

Dengan demikian, dalam konteks Provinsi Jawa Timur periode 2010–2024, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana pengaruh upah minimum dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama setelah fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan kedua variabel ini penting agar kebijakan pengupahan dan pengembangan industri dapat berjalan searah dan saling mendukung.

Secara teoritis, hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan melalui teori permintaan tenaga kerja, yang menyatakan bahwa kenaikan upah cenderung menurunkan permintaan tenaga kerja apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas (Fikri & Alfaridzi, 2024). Namun, apabila kenaikan upah disertai peningkatan produktivitas, maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Beragam penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh upah minimum terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja, namun sebagian besar hanya menyoroti periode yang relatif pendek dan belum menelusuri perubahan struktural secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Padahal, dinamika perekonomian daerah seperti Provinsi Jawa Timur yang mengalami proses transformasi industri selama lebih dari sepuluh tahun memerlukan pendekatan analisis jangka panjang agar dampak kebijakan upah minimum dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Di sisi lain, banyak studi sebelumnya masih meneliti pengaruh upah minimum secara terpisah tanpa mempertimbangkan peran jumlah unit usaha sebagai faktor yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Peningkatan jumlah unit usaha pada

dasarnya mampu membuka lapangan kerja baru yang dapat mereduksi efek negatif dari kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut, penelitian yang secara tegas membedakan pengaruh kedua variabel tersebut antar subsektor industri maupun antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur masih sangat terbatas. Padahal, struktur ekonomi, kapasitas usaha, dan tingkat industrialisasi setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Variasi ini memungkinkan adanya perbedaan pengaruh yang belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, sejumlah studi sebelumnya juga belum memperhitungkan adanya potensi endogenitas, di mana kebijakan upah minimum dan jumlah unit usaha bisa saja dipengaruhi oleh kondisi pasar kerja yang sedang berlangsung. Akibatnya, sebagian temuan hanya bersifat korelasional dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan hubungan sebab-akibat yang nyata.

Dari sisi metodologi, sebagian besar penelitian terdahulu juga belum memasukkan variabel pengendali penting seperti tingkat investasi, produktivitas tenaga kerja, serta laju pertumbuhan ekonomi daerah yang turut menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Kondisi ini menyebabkan hasil penelitian berpotensi kurang akurat dan tidak sepenuhnya merepresentasikan situasi sebenarnya di lapangan. Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini berupaya memberikan kontribusi empiris dengan menganalisis secara simultan pengaruh upah minimum dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010–2024, menggunakan pendekatan data panel yang lebih komprehensif, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pengaruh upah minimum dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri Provinsi Jawa Timur periode 2010–2024 sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap literatur ekonomi regional, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan dan pengembangan industri yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif, yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya serta memperoleh hasil penelitian yang objektif dan terukur (Agustianti et al., 2022). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode analisis statistik yang berfokus pada penggambaran dan penyajian data sebagaimana adanya, tanpa bermaksud melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan yang bersifat luas (Abdussamad & Sik, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Subjek Penelitian

1. Letak Geografis

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penamaan “Jawa Timur” didasarkan pada letak geografisnya yang berada di bagian timur Pulau Jawa. Secara keseluruhan, Pulau Jawa terdiri atas enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Jawa Timur telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi dalam wilayah administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan ini bermula pada 19 Agustus 1945, bertepatan dengan pembentukan delapan provinsi pertama di Indonesia. Pada masa tersebut, R. Suryo diangkat sebagai gubernur pertama Jawa Timur, menandai dimulainya peran resmi provinsi ini dalam sistem pemerintahan Indonesia yang merdeka.

Dilihat dari letak astronomis, Provinsi Jawa Timur berada pada koordinat antara 111,1°–114,4° Bujur Timur dan 7,12°–8,48° Lintang Selatan. Secara geografis, wilayah ini terletak di ujung timur Pulau Jawa. Jawa Timur berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, Pulau Bali di bagian timur, Laut Jawa di sisi utara, serta Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Gambaran mengenai posisi wilayah tersebut dapat dilihat lebih rinci melalui peta Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1 Peta Jawa Timur



Sumber: Statistik Balai KSDA Jawa Timur I Tahun 2024

Berdasarkan peta yang tersedia, wilayah Provinsi Jawa Timur secara umum terbagi ke dalam dua kawasan utama, yaitu wilayah daratan yang berada di Pulau Jawa dan wilayah kepulauan yang mencakup Pulau Madura. Penggabungan kedua kawasan tersebut membentuk keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Total luas provinsi ini tercatat sebesar 46.428,57 km², yang meliputi wilayah darat maupun perairan laut.

Dengan luas wilayah tersebut, Provinsi Jawa Timur secara administratif terbagi menjadi 38 satuan pemerintahan daerah yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam wilayah Jawa Timur antara lain Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Adapun kota-kota di Provinsi Jawa Timur meliputi Batu, Blitar, Kediri, Malang, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya.

Secara topografi, wilayah Provinsi Jawa Timur sebagian besar berupa dataran rendah. Sekitar 60% dari luas keseluruhan wilayahnya, yakni kurang lebih 28.833 km², terdiri atas dataran rendah, sementara sekitar 40% sisanya atau sekitar 17.597 km² merupakan daerah dataran tinggi. Kawasan yang termasuk dataran rendah di antaranya Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan, yang umumnya tidak memiliki bentang alam berupa gunung atau perbukitan. Sebaliknya, wilayah seperti Malang, Batu, dan Lumajang lebih didominasi oleh kondisi geografis berupa gunung dan pegunungan.

Provinsi Jawa Timur memiliki banyak gunung, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Beberapa gunung berapi aktif yang terdapat di wilayah ini antara lain Gunung Semeru, Gunung Kelud, Gunung Bromo, dan Gunung Raung. Selain itu, terdapat pula gunung-gunung yang berstatus tidak aktif atau gunung tidur, seperti Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna, serta Gunung Lawu yang berada di wilayah Magetan. Keindahan alam dan karakteristik khas gunung-gunung tersebut menjadikannya tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Kegiatan pariwisata ini juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pegunungan.

Di samping memiliki deretan pegunungan, Provinsi Jawa Timur juga dialiri oleh berbagai sungai, baik berukuran besar maupun kecil. Beberapa sungai utama yang melintasi wilayah ini antara lain Sungai Brantas, Bengawan Solo, Sungai Konto, dan Sungai Mas. Pada masa terdahulu, sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi yang penting karena dianggap lebih efektif dibandingkan jalur darat.

Akses menuju Provinsi Jawa Timur relatif mudah karena didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Dalam hal transportasi udara, provinsi ini memiliki sejumlah bandara yang melayani kebutuhan mobilitas penduduk, di antaranya Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Bandara Blimbingsari di Banyuwangi, Bandara Notohadinegoro di Jember, serta bandara yang berada di wilayah Madiun dan Sumenep. Keberadaan enam bandara tersebut berperan penting dalam menunjang kelancaran perjalanan masyarakat, baik antarwilayah di dalam provinsi maupun ke luar Provinsi Jawa Timur.

Akses menuju Provinsi Jawa Timur tidak hanya tersedia melalui transportasi udara, tetapi juga dapat ditempuh melalui jalur laut. Provinsi ini memiliki Pelabuhan Tanjung Perak yang berfungsi sebagai pelabuhan utama dan memegang peranan strategis dalam kegiatan transportasi laut. Selain itu, terdapat pula berbagai pelabuhan berskala kecil yang tersebar di sejumlah wilayah. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa antar daerah.

Di samping jalur udara dan laut, transportasi darat merupakan moda yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sarana transportasi darat di Jawa Timur terbagi menjadi dua jenis, yakni jalan non-tol dan jalan tol. Jalan non-tol umumnya tersedia di hampir seluruh wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga pedesaan. Meskipun demikian, masih dijumpai beberapa ruas jalan yang kondisi infrastrukturnya belum optimal, seperti jalan yang belum beraspal atau minim penerangan pada malam hari. Selain itu, Jawa Timur juga dilengkapi dengan sejumlah jalan tol yang mempermudah mobilitas, antara lain Jalan Tol Surabaya–Gresik dan Surabaya–Porong. Tidak hanya itu, beberapa proyek jalan tol lainnya masih dalam tahap pembangunan, seperti Jalan Tol Surabaya–Mojokerto dan Jalan Tol Mojokerto–Ngawi.

Penyediaan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan sarana transportasi yang baik memungkinkan sektor industri dan aktivitas perekonomian di Jawa Timur terus tumbuh dan berkembang. Kondisi ini diperkuat oleh keberadaan sejumlah kawasan industri utama, seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto. Infrastruktur transportasi yang memadai, disertai dengan keterpaduan antarjalur transportasi, dapat menunjang kelancaran serta keamanan berbagai kegiatan ekonomi.

Selain mendukung sektor ekonomi, pembangunan sarana transportasi juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Timur. Provinsi ini memiliki beragam destinasi wisata unggulan, antara lain Gunung Bromo, jalur pendakian Gunung Semeru, Puncak Ijen, kawasan pantai di Malang Selatan, serta pantai-pantai di Banyuwangi. Tanpa dukungan transportasi yang memadai, akses menuju objek-objek wisata tersebut akan menjadi terbatas bagi para wisatawan.

2. Penataan Demografi

Demografi merupakan cabang ilmu yang mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan penduduk. Istilah kependudukan berasal dari kata “penduduk” yang mendapatkan imbuhan “ke-” dan “-an”. Secara umum, penduduk dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang menetap dan tinggal di suatu wilayah tertentu.

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Jawa Timur tercatat sebesar 39.698.631 jiwa, yang terdiri atas 20.097.855 penduduk perempuan dan 19.600.776 penduduk laki-laki. Jumlah tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan proyeksi dalam buku Statistik Kependudukan, jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 41.527.900 jiwa. Dengan jumlah tersebut, Jawa Timur menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

Penduduk Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, yaitu penduduk yang bermukim di kawasan perdesaan dan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Secara umum, jumlah penduduk yang menetap di daerah perdesaan masih lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kota. Sementara itu, penduduk perkotaan sebagian besar merupakan pendatang, baik yang berasal dari luar Jawa Timur maupun dari luar negeri. Sebaliknya, penduduk asli Jawa Timur umumnya lebih banyak bermukim di wilayah perdesaan.

Perbedaan tempat tinggal tersebut juga berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan umumnya bekerja sebagai karyawan perkantoran, buruh pabrik, pegawai negeri sipil (PNS), serta berbagai jenis pekerjaan lainnya di sektor jasa dan industri. Di sisi lain, penduduk perdesaan sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan, seperti petani dan nelayan, serta profesi lain seperti guru. Meskipun demikian, terdapat pula sebagian penduduk desa yang bekerja sebagai karyawan pabrik atau perkantoran.

Kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur menunjukkan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketidakseimbangan tersebut memicu terjadinya kesenjangan ekonomi yang berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, sekitar 24,6% penduduk Jawa Timur berada di bawah garis kemiskinan, dengan sekitar 16% di antaranya tergolong dalam kategori sangat miskin. Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi umumnya berada di wilayah yang memiliki aktivitas dan perputaran ekonomi rendah, seperti Kabupaten Sumenep, Situbondo, Bondowoso, serta beberapa wilayah lain yang termasuk kawasan tapal kuda.

3. Kondisi Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Kondisi sosial masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan suatu wilayah. Masyarakat Jawa Timur pada dasarnya memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia. Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai wilayah yang bersifat majemuk, ditandai oleh keberagaman suku bangsa serta tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, dan budaya yang relatif lebih maju. Keanekaragaman dan kemajuan tersebut menjadikan Jawa Timur memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar daerah untuk datang dan menetap. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan kondisi masyarakat Jawa Timur, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan budaya.

1) Kondisi Ekonomi

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki kondisi perekonomian relatif stabil dan berkembang. Berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat sebesar 4,95%. Meskipun angka tersebut sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,04%, Jawa Timur tetap masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan kinerja ekonomi terbaik di Indonesia serta menempati peringkat kedua di wilayah Pulau Jawa.

Perkembangan ekonomi Jawa Timur didukung oleh keberadaan berbagai sektor industri yang berkembang di wilayah ini. Beberapa sektor unggulan antara lain industri tekstil, rokok,

peternakan, dan pertanian. Meskipun demikian, dibandingkan sektor lainnya, sektor pertanian tercatat sebagai sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan paling lambat terhadap perekonomian daerah Jawa Timur.

Walaupun Provinsi Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, daerah ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, tingkat pengangguran pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,88%. Angka tersebut diperkirakan berpotensi mengalami peningkatan seiring dengan dinamika kondisi perekonomian saat ini, sehingga upaya penurunan pengangguran di Jawa Timur menghadapi tantangan yang semakin besar.

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi di Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah menurunnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian. Banyak penduduk yang beralih dari sektor pertanian ke sektor industri, perkantoran, maupun memilih profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Peralihan tersebut menyebabkan banyak lahan pertanian tidak lagi digarap secara optimal, bahkan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman, sehingga berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja. Kondisi ini sejalan dengan laporan Lokakarya Analisa Diagnosis Ketenagakerjaan tahun 2021 yang menyebutkan bahwa sektor pertanian hanya mampu menyerap sekitar 10% lapangan kerja setiap tahunnya. Keadaan ini sangat kontras dengan periode 1975–1995, ketika sektor pertanian masih menjadi sumber utama mata pencaharian sebagian besar masyarakat.

2) Kondisi Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Di Provinsi Jawa Timur, sektor pendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat berkat kehadiran berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki reputasi baik. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi tersebut turut menarik banyak calon mahasiswa dari luar daerah untuk menempuh pendidikan di wilayah ini. Tidak hanya itu, masyarakat Jawa Timur sendiri juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke jenjang perguruan tinggi yang tersedia.

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Jawa Timur saat ini dapat dikategorikan cukup baik. Hampir semua lapisan masyarakat sudah memiliki akses terhadap pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Kondisi ini berdampak pada masih tingginya angka buta aksara di provinsi tersebut. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, tercatat sekitar 800 ribu orang di Jawa Timur masih tergolong buta huruf.

3) Kondisi Budaya

Kebudayaan merupakan cerminan dari gagasan, nilai, serta hasil pemikiran manusia yang terwujud dalam berbagai bentuk — baik berupa karya nyata maupun perilaku sehari-hari. Semakin besar jumlah individu dalam suatu masyarakat, semakin beragam pula bentuk kebudayaan yang lahir dan berkembang di dalamnya.

Kondisi serupa dapat ditemukan di Provinsi Jawa Timur, tempat berbagai kelompok etnis dengan latar budaya yang berbeda hidup berdampingan. Di wilayah ini terdapat masyarakat dari suku Jawa, Madura, Osing, Tengger, dan beberapa etnis lainnya. Keanekaragaman ini menjadi faktor penting dalam terjaganya berbagai tradisi dan kebiasaan khas yang diwariskan oleh setiap suku sesuai nilai serta kepercayaannya masing-masing.

Ketika berbicara mengenai kebudayaan, unsur seni tidak dapat dipisahkan darinya. Kesenian berfungsi sebagai media ekspresi serta sarana hiburan bagi masyarakat. Jawa Timur memiliki banyak bentuk seni tradisional yang tetap eksis hingga kini, antara lain pertunjukan wayang, ludruk, tari remo, serta kesenian reog yang menjadi simbol identitas daerah.

Selain seni, bahasa juga menjadi elemen fundamental dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat. Setiap kelompok etnis umumnya memiliki bahasa sendiri yang mencerminkan cara berpikir dan berkomunikasi mereka, meskipun dalam beberapa kasus terdapat kemiripan antara satu bahasa dengan yang lain.

Di Provinsi Jawa Timur, keberagaman bahasa menjadi salah satu wujud nyata kekayaan budayanya. Berbagai bahasa daerah digunakan oleh masyarakat setempat, di antaranya Bahasa Jawa, Bahasa Madura, Bahasa Osing, Bahasa Bawean, serta sejumlah dialek lokal lainnya yang memperkaya corak linguistik daerah tersebut.

Analisi Deskriptif

1. Upah

Gambar 2
Upah Minimum Wilayah Jawa Timur



Sumber: Data BPS Jawa Timur, diolah 2024

Berdasarkan grafik, upah minimum di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun 2010 hingga 2024. Kenaikan terjadi secara bertahap, dengan pertumbuhan yang relatif lambat pada awal periode (2010–2014) dan meningkat lebih cepat sejak 2015 hingga mencapai puncak sekitar Rp2.500.000 pada tahun 2024.

Kenaikan ini menggambarkan adanya kebijakan pengupahan progresif oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, peningkatan upah juga dapat berdampak ganda terhadap sektor industri — di satu sisi meningkatkan daya beli tenaga kerja, tetapi di sisi lain menambah beban biaya produksi bagi perusahaan.

2. Jumlah Unit Usaha

Gambar 3
Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Sedang dan besar



Sumber: Data BPS Jawa Timur, diolah 2024.

Berdasarkan Gambar 2, jumlah unit usaha sektor industri sedang dan besar di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2010 hingga 2024. Peningkatan ini terlihat dari jumlah unit usaha yang terus bertambah setiap tahun, dengan kenaikan yang cukup tajam pada periode 2015–2020 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 sekitar 825.000 unit usaha.

Pertumbuhan jumlah unit usaha ini mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam sektor industri di Jawa Timur. Kenaikan tersebut mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif, kemudahan perizinan usaha, serta meningkatnya permintaan terhadap produk industri lokal.

Dalam konteks penelitian ini, meningkatnya jumlah unit usaha berpotensi mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, karena semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi memerlukan tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, jumlah unit usaha menjadi variabel penting yang memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Jawa Timur selama periode 2010–2024.

3. Penyerapan Tenaga Kerja

Gambar 4
Penyerapan Tenaga Kerja



Sumber: Data BPS Jawa Timur, diolah 2024.

Berdasarkan grafik Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur periode 2010–2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal periode (sekitar tahun 2010–2012), penyerapan tenaga kerja masih relatif rendah, namun mulai menunjukkan peningkatan yang konsisten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi antara tahun 2018–2021, secara keseluruhan tren menunjukkan arah positif.

Kenaikan ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum dan bertambahnya jumlah unit usaha memiliki hubungan positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah serta kebijakan upah yang kondusif mampu mendorong sektor industri untuk memperluas kapasitas produksinya dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Hasil Penelitian

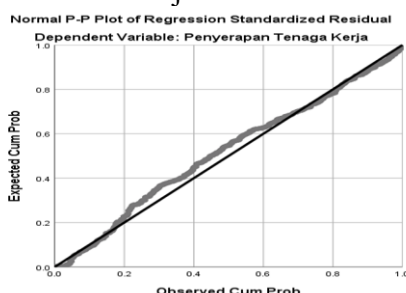
1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikasinya. Residual berdistribusi normal ketika nilai signifikasinya $> 0,05$ dan sebaliknya jika nilai signifikasinya $< 0,05$ maka residual tidak berdistribusi normal. Hasil dari pengujian normalitas dapat dilihat pada Gambar 5. dan Tabel 5:

Gambar 5

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Primer di Olah (Output SPSS 25), 2026.

Gambar Normal P–P Plot of Regression Standardized Residual di atas menunjukkan hasil uji normalitas pada model regresi dengan variabel dependen penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan grafik tersebut, titik-titik data residu tersebar di sekitar dan mengikuti garis

diagonal, yang mengindikasikan bahwa data residual berdistribusi secara normal.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ABS_RES
N		435
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.1122
	Std. Deviation	.89669
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.108
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

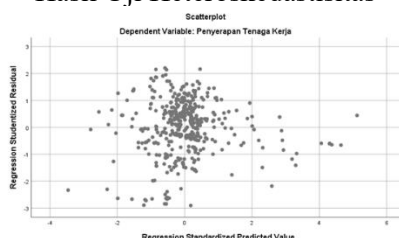
Sumber: Output SPSS V.25, 2026

Berdasarkan pada tabel di atas, hasil uji normalitas melalui tes statistik Kolmogorov-Smirnov ditemukan bahwa nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,200. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser dapat dilakukan untuk menguji heteroskedastisitas dengan menganalisis tingkat signifikansinya. Apabila hasil uji diatas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila hasilnya dibawah signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 4.45656.

Gambar 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 25,2026

Berdasarkan gambar tersebut, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak tampak adanya pola tertentu, dan titik-titik data tersebar secara acak di atas maupun di bawah garis nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 2
Hasil Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.689 ^a	.536	.431	1.43298	2.047

a. Predictors: (Constant), Jumlah Unit Usaha, Upah

b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber: Output SPSS V.25, 2026

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,047 dengan tingkat signifikansi 0,05. Jumlah sampel (n) = 435, jumlah variabel independen (k = 2), nilai dL (batas bawah) = 1, 1,8091, nilai dU (batas atas) = 1,8181. Oleh karena itu, nilai $dU < DW < 4-dU$ atau $1,8091 < 2,023 < 2,1909$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	95.438	.544		660.665	.000		
Upah	3.027	.312	.509	2.298	.002	.998	1.002
Jumlah Unit Usaha	2.162	.220	.414	3.180	.002	.998	1.002

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber: Output SPSS V.25, 2026

Berdasarkan Tabel 4. mendapatkan hasil bahwa variabel independen upah minimum (X₁), dan jumlah unit usaha (X₂) mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel terikat penyerapan tenaga kerja, bila nilai variabel bebas upah minimum dan jumlah unit usaha naik turun. Adapun hasil yang telah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	95.438	.544		660.665	.000
Upah	3.027	.312	.509	2.298	.002
Jumlah Unit Usaha	2.162	.220	.414	3.180	.002

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber: Output SPSS V.25, 2026

Berdasarkan tabel di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah:

Berdasarkan pada Tabel 4. terdapat penjelasan mengenai persamaan pada analisis regresi linear berganda. Berikut rumus pada analisis regresi linear berganda pada penelitian ini.

$$Y = 95,438 + 3,027X_1 + 2,162X_2 + e$$

Berdasarkan rumus analisis regresi linear berganda, maka kesimpulan mengenai hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Nilai koefisien regresi variabel upah minimum (X_1) sebesar 3,027 dengan tanda positif. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hipotesis kedua (H_2) dinyatakan diterima, di mana sebelumnya diprediksi bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berpotensi mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan searah antara kedua variabel tersebut, yang berarti setiap kenaikan pada tingkat upah minimum diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Upah minimum merupakan tingkat upah terendah yang secara sah wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dalam satu periode kerja tertentu. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mampu meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas kegiatan usaha. Dengan meningkatnya produktivitas dan daya saing perusahaan, kebutuhan tenaga kerja pun turut meningkat untuk mendukung aktivitas operasional yang lebih luas. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Aldrin A. C. Makatutu¹, Agnes L. Ch. P. Lapian, Irawaty Masloman (2023) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Jumlah Perusahaan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Provinsi Sulawesi Utara.” Penelitian tersebut juga menunjukkan upah minimum, jumlah perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Nilai koefisien regresi variabel jumlah unit usaha (X_2) sebesar 2,162 dengan tanda positif. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan diterima, yang menunjukkan bahwa jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, semakin banyak unit usaha yang berdiri di suatu wilayah, semakin besar pula peluang penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Hubungan positif ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan jumlah unit usaha akan diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang tersedia. Jumlah unit usaha mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan dinamika sektor produksi di suatu daerah. Semakin banyak unit usaha yang beroperasi, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan produksi, administrasi, pemasaran, dan distribusi barang maupun jasa. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Hasil ini konsisten dengan penelitian Nur Soca, Nenik Woyanti (2021) berjudul “Pengaruh Unit Usaha, Nilai Output, Biaya Input, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Unit Usaha berpengaruh positif dan signifikan, Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Uji Hipotesis

a. Hasil Uji-t (Uji Parsial)

Tabel 5
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	Standardized Coefficients Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	95.438		.544	660.665	.000
Upah	3.027	.509	.312	2.298	.002

Jumlah Unit Usaha	2.162	.220	.414	3.180	.002
-------------------	-------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber: Output SPSS V.25, 2026

- a. Berdasarkan hasil uji parsial yang didapatkan antara upah minimum (X₁) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) mendapatkan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,298 > t$ tabel $1,965$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.
 - b. Berdasarkan hasil uji parsial yang didapatkan antara jumlah unit usaha (X₂) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) mendapatkan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,180 > t$ tabel $1,965$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.
- b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	32.981	2	16.490	18.031	.000 ^b
Residual	887.078	432	2.053		
Total	920.058	434			

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja

b. Predictors: (Constant), Jumlah Unit Usaha, Upah

Sumber: Output SPSS V.25, 2026

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai f-hitung $18,031 > f$ -tabel $2,99$, dengan nilai probabilitas $0,000$. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari $0,05$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penyerapan tenaga kerja atau dapat dikatakan variabel bebas yaitu upah minimum dan jumlah unit usaha secara bersama – sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

- c. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.536	.431	1.43298

a. Predictors: (Constant), Jumlah Unit Usaha, Upah

Sumber: Output SPSS V.25, 2026

Berdasarkan pada Tabel 4.7 hasil uji koefisien korelasi yaitu mengukur pengaruh upah minimum (X₁), dan jumlah unit usaha (X₂) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) dengan nilai sebesar $0,431$ atau $43,1\%$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam uji koefisien korelasi, variabel upah minimum dan jumlah unit usaha dapat memprediksi variabel penyerapan tenaga kerja sebesar $43,1\%$ dan $46,9\%$ dipengaruhi oleh variabel lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur Periode 2010–2024”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Temuan ini sejalan dengan teori upah efisiensi (efficiency wage theory), yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum mampu meningkatkan motivasi, produktivitas, serta daya beli pekerja, yang pada gilirannya memperluas kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.
2. Jumlah Unit Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak unit usaha yang beroperasi di suatu wilayah, semakin besar pula peluang terbukanya lapangan kerja baru. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah unit usaha industri di Jawa Timur berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja.
3. Secara simultan, upah minimum dan jumlah unit usaha berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri. Kedua variabel independen ini mampu menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja sebesar 43,1%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti investasi, produktivitas, dan kondisi makroekonomi daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

4. Bagi Pemerintah Daerah

Hendaknya kebijakan upah minimum ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha serta kebutuhan hidup layak pekerja. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kemudahan berusaha untuk meningkatkan jumlah unit usaha industri di berbagai daerah.

5. Bagi Pelaku Industri

Disarankan untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan kebijakan upah minimum tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja. Peningkatan efisiensi produksi dan inovasi dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas tenaga kerja.

6. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti investasi, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi, serta menggunakan pendekatan data panel agar hasilnya lebih komprehensif dan relevan terhadap dinamika ketenagakerjaan di masa mendatang.

7. Bagi Masyarakat dan Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman bahwa peningkatan upah minimum harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas kerja agar daya saing tenaga kerja dan industri di Jawa Timur dapat terus meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Agista, R., Wulansari, N., Imaningsih, N., Setya Wijaya, R., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Pengaruh Modal, Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tuban. *Equilibrium*, 10(2), 137–145.

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Tohar Media.
- Ansori, M. (2020). Metode penelitian kuantitatif Edisi 2. Airlangga University Press.
- Aprilia Sasi Lestari, A., Iranto, D., & Wibowo, A. (2024). Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa 2013-2022. EKOMA : Jurnal Ekonomi, 3(5).
- Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). Metode penelitian kuantitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azzahra, F., & Mukhtar, S. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2016-2022 The Influence of Gross Domestic Regional Product, Provincial Minimum Wage, and Human Development Index to Labor Absorption in Indonesia in 2016-2022. SINOMIKA JOURNAL | VOLUME, 2(2). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i2.122>
- Billa Ananda, S., Yuliana, Y., & Hidayat, T. (2022). Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Bisnis Net, 5(1), 2722–3574.
- Bps Provinsi Jawa Timur. (2024). Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja Investasi Dan Nilai Produksi. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/mje1nymx/jumlah-perusahaan--tenaga-kerja--investasi--dan-nilai-produksi-pada-industri-besar-dan-sedang-menurut-kabupaten--kota-di-provinsi-jawa-timur--2024.html>
- Bps Provinsi Jawa Timur. (2024). Rata-Rata Jam Pekerja Pegawai. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mte3mimy/upah-rata---rata-per-jam-pekerja-menurut-provinsi.html>
- Bps Provinsi Jawa Timur. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/v2povwjwchjurgg0u2ponfjyaexhvx0tuhacvfumdkjmw==/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-dan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-provinsi.html?Year=2024>
- Fikri, A., & Alfaridzi, M. (2024). Buku Ajar Ekonomi Teknik. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fitrianti, A. N. (2023). Ekonomi sumber daya manusia.
- Hoppe, H. H. (2007). Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian. Ciputat, Indonesia.
- Indri Widyapangesti, D., Soelistyo ab Ekonomi Pembangunan, A., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. In Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) (Vol. 6, Issue 1).
- Juhro, S. M., & Trisnanto, B. (2018). Paradigma dan Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen Indonesia (Endogenous Paradigm and Growth Model for Indonesian Economy).
- Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., ... & Milia, J. (2024). Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Malik, N. (2018). Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia (Vol. 1). UMMPress.
- Miradj, S., & Shofwan, I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Octoviani, A., & Puspita, A. S. (2023). Implementasi Triple Helix Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Industri Kreatif. Jurnal Digital Bisnis, Modal Manusia, Marketing, Entrepreneurship, Finance, & Strategi Bisnis (Dimensi), 3(1), 13–22.
- Soca, N., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh Unit Usaha, Nilai Output, Biaya Input, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Besar Dan Sedang Di Provinsi Jawa Tengah. BISECER (Business Economic Entrepreneurship, 4(2).
- Sukarniati, L., Lubis, F. R. A., & Zakiyyah, N. A. A. (2021). Ekonomi Pembangunan (Teori dan Tantangan di Negara Berkembang). UAD PRESS.

- Syakur, R. M., Ningsih, M., & Amrullah, N. (2024). Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja dengan Penguatan Upah Minimum Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Sinjai. *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 6(2), 115–130.
- Tasyim, D., Kawung, G., Dj Siwu, H., R S Tasyim, D. A., V Kawung, G. M., Dj Siwu, H. F., Ekonomi dan Bisnis, F., & Ekonomi Pembangunan, J. (2021). The Influence Of Sme's Unit And Gdrp On Employment Absorption In North Sulawesi. *Jurnal EMBA*, 9(3), 391–400.
- Tersiana, A. (2018). Metode penelitian. Anak Hebat Indonesia.
- Unaradjan, D. D. (2019). Metode penelitian kuantitatif. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Waloni, N. Z., Kawung, G. M., & Tolosang, K. D. (2025). Analisis Pengaruh Nilai Produksi, Investasi Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Besar Dan Sedang Di Provinsi Sulawesi Utara. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 687–706. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>Halaman:687-706
- Widodo, P. E. N., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, Unit Usaha, Dan UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur di Jawa Timur. *JEEP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(1), 33–45.